

Daftar Pustaka

Buku – buku :

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ashsofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal & Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hanitijo, Ronny. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Hartanto, J. Andy. 2012. *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Manulang, Rinto. 2012. *Segala Hal Tentang Tanah Rumah & Perizinannya*. Yogyakarta : Buku Pintar.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta : Kompas.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta : Kompas.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Serifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syarief, Elza. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Indonesia Legal Center Publishing, Cetakan Kedua, 2011.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia.

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Mei 2012, Nomor 157/Pdt/G/2012/PN.SMG.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi :

Febriantina, Reza. 2010. *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Otentik*. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Ismudiyantun, Anna. 2009. *Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah*. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Mudrikah, Ririn. 2006. *Cacatnya Sebuah Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Oleh Camat Sebagai PPAT-Sementara Akibat Tidak Adanya Pendidikan Khusus Pembuatan Akta (Analisis Akta Jual Beli Tanah Di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi)*. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Rahmadani, Yulianti Ayu. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Hal Pengajuan Permohonan Hak Atas Tanah (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No.138/G/2007/PTUN.JKT)*. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Kamus, Majalah, Surat Kabar, Terbitan lain-lain, dan Website :

Widagdo, Setiawan, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

M.Kn.Universitas Indonesia 2008, “Sistem Pendaftaran Tanah Pada Suatu Negara”,[http://xa.yimg.com/kq/groups/.../TugasPen+\(kel1\).doc](http://xa.yimg.com/kq/groups/.../TugasPen+(kel1).doc), 3 Maret 2013.

Prof.Dr.Muladi,S.H.,“Pelanggar Etika, Cenderung Pelanggar Hukum”,
http://medianotaris.com/pelanggar_etika_cenderung_melanggar_hukum_berita185, 4 Maret 2013.